

## BAB 2

# PENGUATAN EFIKASI KOLEKTIF PETANI BAGI KETAHANAN PANGAN YANG LESTARI

**Cahya Widiyanto, S.Psi., M.Si.**

**Prof. Dr. Faturochman, M.A.**

### 2.1. PENDAHULUAN

*"Primus manducare, deinde philosophare;* makan dulu barulah berfilsafat, begitulah bunyi pepatah Yunani yang menggambarkan betapa vitalnya pangan bagi manusia. Pangan menjadi hal yang sangat fundamental dalam mendukung segala aktivitas manusia. Ketersediaan pangan sangat menentukan eksistensi kehidupan manusia. Perbincangan peradaban menganggap pangan terkesan remeh, namun harus diakui bahwa segalanya dimulai dari pangan. Pangan adalah lapisan dasar (*basic layer*) yang harus diselesaikan manusia bagi pencapaian tahap selanjutnya.

Gangguan dalam ketersediaan pangan akan memicu berbagai persoalan yang tidak cukup berhenti pada lingkup individual semata, namun dapat berkembang menjadi persoalan besar dan kolektif sifatnya. Tak hanya sekedar rasa lapar, namun bisa sampai ke ranah ekonomi, sosial, budaya bahkan politik kebangsaan. Akibat krisis pangan yang serius maka persoalan yang ditimbulkan tak bisa dibilang remeh, justru sebaliknya.

Implementasi kebijakan pangan setiap saat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan isu jaman yang terjadi. Perjalanan perubahan yang tak dapat diikuti kebijakan seringkali membuat paradigma tentang tata kelola pangan tidak lagi *up to date*, sumir dan bahkan kadang

menjadi ironi. Sementara perubahan senantiasa terus berjalan, dengan menumpahkan berbagai persoalan kompleks dan berimplikasi langsung pada pangan, antara lain adalah soal ekologi, sumber daya manusia, politik ekonomi, sosial budaya dan juga demografi.

Dalam konteks pangan di Indonesia, perubahan (baca: degradasi) ekologi telah mempengaruhi kualitas dan kuantitas pangan yang dihasilkannya. Hal-hal yang terkait di dalamnya adalah penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air yang terbatas, hama yang akut dan perubahan musim yang tidak terprediksi (*shock climate change*). Persoalan SDM yang terkait dengan pangan ditengarai dengan minimnya kapabilitas produsen pangan yang direfleksikan dengan rendahnya keahlian petani, serta integritas profesi yang tidak mendukung. Faktor politik ekonomi yang mempengaruhi pangan adalah perdagangan bebas yang saat ini sedang gencar mendunia; pada satu sisi perdagangan bebas menyediakan rute lalu lintas konsumsi pangan sangat leluasa menjelajah, namun pada sisi yang lain justru telah 'menyerang' produksi lokal karena rentannya daya saing produk lokal pada pasar internasional. Persoalan sosial budaya menyangkut pangan terindikasi melalui perkembangan tradisi produksi dan konsumsi pangan yang penuh jalan pintas; mulai dari budi daya tanam yang penuh manipulasi kimia sampai dengan pola konsumsi pangan yang bergaya *instant* pada sebagian besar masyarakat. Sedangkan faktor demografi adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang hal ini secara logis menuntut peningkatan persediaan pangan (Abas dkk, 2003).

Pangan sebagai sumber daya yang vital ternyata memiliki kompleksitas yang tak terbantahkan. Secara simultan berbagai faktor turut serta dalam menciptakan hitam putihnya situasi pangan. Satu pergerakan faktor dengan penuh keniscayaan mempengaruhi faktor yang lain, hingga menciptakan konfigurasi situasi pangan yang tak sederhana digambarkan. Misalnya, pasar bebas yang memberi peluang bagi komoditas produk pangan secara mendunia, ternyata pada sisi yang lain telah menciptakan berbagai kemahalan bagi produksi pangan lokal, dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas ekologi pangan, ledakan populasi yang mendorong dilakukan impor pangan, ternyata juga telah menampar para produsen pangan lokal, hingga terampas nilai produknya.

Dinamika situasi tersebut menciptakan retardasi etos kerja pelaku pangan secara pasti karena apresiasi yang diterima baik secara sosial maupun ekonomi mengalami kejatuhan. Demikian berbagai faktor persoalan berinteraksi, sehingga membentuk situasi pangan yang serba dilematis (Saragih, 2009).

Ketahanan pangan dipahami sebagai suatu sistem yang menyangkut ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan yang direfleksikan dalam pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan atas produk pangan. Ketersediaan pangan dinyatakan dengan segala usaha untuk produksi pangan, distribusi diimplementasikan dengan penciptaan sistem alir pemasaran, dan konsumsi ditempuh dengan kebijakan-kebijakan tentang kaidah menyangkut nilai gizi dan keamanan pangan termasuk kehalalan. Secara gampang, indikator berjalannya sistem ini adalah status gizi dari masyarakat yang ditunjukkan dengan Angka Ketercukupan Gizi (AKG).

Sebagai sebuah sistem, idealnya ketahanan pangan harus dipahami secara dalam, meliputi berbagai dimensi yang membentuknya, bukan semata pada alir mekanisme ekonomi; dari produksi-distribusi-konsumsi, atau malahan justru hanya pada aspek teknisnya saja. Pemahaman atas sistem harus juga secara kritis terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih dalam atas latar belakang yang menjadi lokomotor berjalannya sebuah sistem. Bukan sekedar berkutat hal hal yang nampak dan terukur tentang pangan, namun juga harus sampai pada penjelajahan tentang hal-hal yang tidak kasat namun sangat menentukan, seperti etos kerja, gaya hidup dan kapasitas sosiopsikologis masyarakat pangan.

Dalam prakteknya, harus diakui bahwa kebijakan ketahanan pangan di Indonesia selama ini masih secara eksklusif berkutat pada *hard layer* dari sistem ketahanan pangan; produktivitas pangan. Dari aspek obsesi pasar, penegakan ketahanan pangan ditempuh dengan aksi pendongkrakan kuantitas dan kualitas produksi menurut selera pasar semata. Misalnya kebijakan Go Organik 2010, secara eksplisit jelas ditegaskan untuk menembus ekspor menuju pasar bebas, bukan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat itu sendiri (Deptan, 2010). Semangat dan janji yang dilansir

kepada para petani adalah harga jual yang tinggi, bukan pada pencapaian kualitas pangan itu sendiri bagi kesejahteraan mereka.

Mampu bersaing dalam pasar internasional bukan sebuah idealisme yang kaprah, bahkan hal itu adalah sebuah tantangan yang menarik. Hanya saja, tidak pernah ada pasar yang stabil, tidak pernah ada pertumbuhan ekonomi yang permanen dalam siklus ekonomi. Arah dan kepentingan politik ekonomi merupakan nuansa yang tidak bisa dinafikan dalam *market game*. Menimbang hal ini, maka langkah yang terlalu berorientasi pada pasar hanya akan menciptakan bias-bias penegakan ketahanan pangan, dan akan menciptakan ironi yang tragis bagi kesejahteraan (tujuan dari ketahanan pangan itu sendiri masyarakat).

Ketahanan pangan yang lestari selalu didukung oleh penguatan pada dimensi manusianya, dan tak hanya berhenti pada mekanisme teknis produksi, distribusi dan konsumsi secara *naif*. Keberanian untuk terlibat pada sosok petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan adalah sebuah prasyarat yang tidak terbantahkan. Adalah sangat tidak mungkin ketahanan pangan tercapai tanpa dukungan petani-petani yang tangguh.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas sebuah cara pandang tentang penguatan ketahanan pangan dengan mengedepankan penguatan kapasitas mental petani. Petani merupakan aktor pelaku yang sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan di Indonesia. Pertanian bukan saja bertanggung-jawab dalam menyediakan produksi pangan, namun pertanian sekaligus bertanggungjawab dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi 25.437.000 rumah tangga petani (BPS, 2010). Secara khusus tulisan ini akan menjustifikasi urgensi efikasi kolektif petani bagi penegakan ketahanan pangan.

Efikasi kolektif merupakan tingkat kepercayaan anggota suatu komunitas dalam mencapai kepentingan-kepentingannya, terkait erat dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Bandura, 1995). Efikasi kolektif dalam konteks petani merupakan sebuah kualitas yang menunjukkan seberapa mampu petani dapat bekerja secara bersama dalam komunitasnya terkait dengan sukses tujuan pertaniannya. Dalam tulisan ini secara khusus akan dibahas tentang situasi dan latar belakang mental petani yang saat ini berkembang, tuntutan serta prasarat ideal yang memiliki relevansi signifikan bagi penciptaan ketahanan pangan yang sejati, juga usulan praktis bagi penguatan efikasi kolektif pada petani.

## 2.2. KESEJAHTERAAN PETANI DAN 'KETAHANAN PANGAN'

Relasi antara pangan dan kesejahteraan telah dianggap sebagai tesis yang kokoh dalam berbagai pernyataan tentang kualitas hidup. Secara internasional, deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, *Universal Declaration on Human Rights* 1948 menyatakan bahwa pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak azasi manusia. Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) tahun 1968 juga menegaskan tentang pentingnya hak bagi setiap orang atas kecukupan pangan; sebagai hak dasar untuk mencapai kondisi sejahtera. Pada tingkat nasional, pernyataan tentang pangan juga telah secara implisit dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28 A, (ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke dua) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Penjabaran deklarasi besar tersebut secara lebih kongkrit dinyatakan dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, yang pada intinya memberikan penegasan bahwa pangan merupakan hal yang sangat penting diusahakan untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan hidup bersama.

Pangan adalah sebuah barang pemenuh kebutuhan manusia yang merupakan hasil dari usaha budidaya, artinya bahwa keberadaan pangan adalah hasil dari sebuah kegiatan. Pangan dalam konteks apapun selalu membutuhkan serangkaian proses tertentu, hingga tersedia. Secara konseptual pangan merupakan hasil dari proses produksi yang melibatkan alam dan manusia yang terangkai melalui aktivitas budidaya tertentu (Highmore, 2008). Manusia pelaku budidaya adalah petani (*farmer*) dan sumber daya alam meliputi segala hal; bahan yang digunakan. Variasi pangan ditentukan oleh varian alam di sekitar manusia sehingga keberagaman pangan terjadi. Masing masing kondisi alam (baca: budaya) selalu memiliki konteks pangan yang khas, namun dari beragam konteks tentang pangan selalu memiliki orientasi yang menyatu yaitu kesejahteraan. Pangan dimanapun merupakan sebuah identitas kebutuhan yang selalu eksis.

Dibalik keberadaan pangan, petani selalu ada dibelakangnya, sebagai kreator, produsen dari pangan. Petani adalah pemulia budidaya

pangan melalui aktivitas pertaniannya. Membicarakan pangan, maka tidak bisa meninggalkan topik tentang petani. Petani dalam pengertian umum merupakan sebuah kelompok profesi yang spesifik dari profesi yang lain. Pengertian yang konvensional menyebutkan bahwa petani merupakan profesi yang natural dan muncul secara otomatis karena kebutuhan pangan, dan senyatanya kita selalu dapat menemukan petani dalam konsep budaya manapun (Highmore, 2008).

Mendiskusikan tentang kesejahteraan, maka pangan menjadi salah satu bagian vitalnya; dan saat mendalami persoalan pangan maka petani menjadi bagian tidak terpisahkan. Dari pernyataan ini memunculkan sebuah sketsa relasi antara kesejahteraan, pangan dan petani. Sebanding saat menghubungkan bahwa pangan menentukan kesejahteraan dan petani menentukan pangan, sampai pada konteks yang lebih khusus menjadi relevan menilik relasi antara kesejahteraan dengan petani, demikian juga saat memahami ketahanan pangan, maka tidaklah berlebihan saat memunculkan petani sebagai sebuah *layer* yang signifikan untuk dibahas (Shiva, 2008).

Secara historis petani membudidayakan pertanian pangan sebagai sebuah strategi subsistem, untuk mencukupi kebutuhan pangannya, namun seiring dengan perkembangan modernisasi yang terjadi; saat defrensiasi pekerjaan terjadi, dan aktivitas sistem ekonomi telah demikian maju, maka aktivitas petanipun berkembang, tak sekedar untuk mencukupi kebutuhan domestiknya, namun mulai terlibat dalam transaksi (Shiva, 2008). Pangan tak semata sebagai aset privat bagi petani, namun telah menjadi komunitas ekonomi yang terpublis. Pada titik ini petani mulai menjadi lapis penyedia kebutuhan publik yang dipertautkan oleh distribusi dan transaksi pasar. Di sinilah hal ketersediaan pangan mulai menjadi masalah, seiring dengan fluktuasi problema pasar yang terjadi.

Bermula dari masalah distribusi dan konsumsi dalam bingkai pola penawaran dan permintaan, maka ketersediaan pangan mulai menjadi persoalan. Dalam desain industrial modern maka pembagian kerja menjadi ciri khas yang pasti. Dalam ranah pangan, maka tidak semua orang adalah petani, padahal semuanya membutuhkan pangan. Disinilah maka istilah kedaulatan pangan, ketahanan pangan muncul dan menjadi wacana serius hingga saat ini. Rumusan konsep tentang kesejahteraan pada tingkat kolektif

selalu menggunakan terminologi ketahanan pangan bagi regulasi pencapaian kesejahteraan. Terminologi ketahanan pangan lalu berkembang menjadi *keyword* ekonomi-politik daripada sebuah istilah pemenuhan kebutuhan. Dalam perkembangan terkini lalu ketahanan pangan menjadi sebuah bahasan yang disetarakan dengan produktivitas pangan. Dalam kerangka pemikiran semacam ini petani hampir tidak pernah ditempatkan sebagai sebuah *root of matter* dalam telaah tentang strategi ketahanan pangan, kecuali tidak lebih sebagai faktor produksi (Shiva, 2008).

Atas paparan di atas, maka menjadi penting untuk mengembalikan kedudukan petani sebagai sebuah peran yang tak dapat ditinggalkan dalam pembahasan tentang ketahanan pangan. Petani sebenarnya menjadi sebuah kata kunci penting saat menjelajahi tentang persoalan ketahanan pangan. Bukan saja karena petani adalah penghasil pangan, namun lebih dari itu petani adalah penentu kualitas pangan. Memperhitungkan petani sebagai peran vital dalam membicarakan tentang ketahanan pangan menjadi sangat relevan, hingga layaklah jika kita mengandaikan hipotesa ini sebuah pernyataan retorik; petani yang tangguh akan menciptakan ketahanan pangan yang kuat.

### 2.3. KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI: SEBUAH PARADOK

Ketahanan pangan seperti dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1996, merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Membaca definisi tersebut, maka secara substansial ketahanan pangan adalah sebuah kebijakan yang digerakkan oleh semangat untuk mencapai kesejahteraan hakiki bagi rakyat.

Konsep ketahanan pangan mengandung empat esensi yang kemudian menjadi barometer ketahanan pangan; (1) Ketersediaan pangan; (2) Stabilitas pangan (3) Aksesibilitas pangan; serta (4) Kualitas pangan. Semua esensi tersebut merupakan sebuah sistem yang terintegrasi, dan tidak bisa dipenggal, diberdirikan satu satu. Ketersediaan pangan akan menjadi tidak berarti, jika secara kualitas pangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan; misalnya terlalu banyak racunnya, atau tidak halal. Kualitas



pangan yang baik akan menjadi tidak berarti ketika tidak mampu diakses, baik karena harga maupun distribusi yang eksklusif. Stabilitas pangan juga tidak pernah menjadi kenyataan saat tidak ada relasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan pangan dan petani.

Menerapkan pengertian ketahanan pangan yang ideal seperti disebutkan dalam konstitusi di atas bukanlah sebuah hal mudah. Ketersediaan pangan mungkin bisa dicapai, namun mutunya sangat rendah. Pada kasus yang lain, kualitas pangan bagus (organik, halal, enak), namun hanya bisa dinikmati oleh bagian masyarakat tertentu lantaran harganya tidak terjangkau. Pernyataan tersebut bukan sebuah pengandaian namun sungguh-sungguh terjadi di Indonesia; beras RASKIN mungkin terbeli oleh semua kelas masyarakat (bahkan diberikan secara gratis bagi yang tidak mampu), namun mutunya buruk (Kompas 30 Januari 2010), pada kenyataan lain beberapa penjual beras menawarkan beras organik yang konon sehat, namun harganya mahal (Rp 7.500-12.500).

Secara umum konsumsi pangan masyarakat Indonesia pada tingkat kualitas yang rendah karena kemampuan daya beli yang terbatas. Khusus pada tingkat petani kualitas pangan yang dikonsumsi termasuk rendah dan sangat terbatas. Sebagai gambaran bahwa pola pangan harapan (PPH) yang menunjukkan kecukupan gizi berimbang di kalangan petani di perdesaan menunjukkan angka 79-80 yang mengindikasikan belum mencapai PPH ideal (100) dengan dominasi (60%) oleh beras (karbohidrat), dan sedikit sekali dari daging dan susu (protein) (Budiastra, 2009). Walaupun rendah, namun pencapaian konsumsi pangan ini telah menghabiskan sekitar 60% pendapatan petani (BPS, 2010).

Kenyataan tersebut disebabkan oleh daya beli petani yang rendah, karena pendapatan yang pas-pasan. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 101,19 (BPS, 2010) mengindikasikan bahwa petani hanya mendapatkan penghasilan yang kecil sekali. Hasil penjualan dan pengeluaran pertaniannya hanya memiliki selisih 0,019. Tingginya biaya produksi pertanian tidak bisa terimbangi oleh hasil penjualan hasil pertanian. Harga pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian yang semakin mahal barangkali merupakan penyebab dari situasi tersebut.

Sempitnya lahan pertanian juga berkontribusi terhadap kondisi buruk tersebut. Luas pemilikan lahan rata-rata 2 Ha/kapita untuk petani



tanaman, dan sebagian besar dari mereka justru hanya memiliki lahan sekitar kurang dari 0,3 Ha/kapita (Iwantoro, 2010). Dengan sumber daya lahan yang terbatas dipastikan bahwa hasil pertanian juga tidak mencukupi kebutuhan keluarga petani. Sebagai resultan dari seluruh tekanan hidup yang dihadapi petani maka menghasilkan sebuah profil kemiskinan petani mencapai 22,19 juta jiwa atau sebesar 18,23 % dari total penduduk Indonesia (BPS, 2010)

Petani sebagai penghasil pangan ternyata juga tidak memiliki akses terhadap pangan yang dihasilkannya secara leluasa. Pun secara makro Indonesia mencapai swasembada beras 2008 dan berlanjut sampai sekarang, namun pada tingkat mikro di tingkat perdesaan, masih banyak ditemukan keluarga petani yang memenuhi kebutuhan berasnya dengan cara membeli (*nempur*) dari pedagang beras (Iwantoro, 2010).

Rendahnya tingkat kesejahteraan di kalangan keluarga petani yang *nota bene* adalah penghasil bahan pangan menunjukkan sebuah situasi ketahanan pangan yang sangat ironis. Konsep ketahanan pangan yang seharusnya mendukung kesejahteraan sungguh menjadi paradoks saat dibenturkan dengan realitas kesejahteraan petani. Apa yang terjadi dalam kehidupan petani sebagai penghasil pangan justru sangat berbeda dengan definisi tentang ketahanan pangan; mulai dari ketersediaan, akses, dan kualitas mutu pangan yang mereka rasakan.

#### 2.4. KETAHANAN PANGAN DARI PENGUATAN MENTAL PETANI

Petani secara eksistensial memiliki relasi kuat dengan pangan. Ketersediaan pangan sangat bergantung dari kreasi karyanya. Tak hanya banyak sedikitnya, namun juga kualitas pangan akan ditentukan oleh sepek terjangnya. Jika hasil kinerja merupakan sebuah aktualisasi dari motif dan mental pelakunya, maka berlaku pemahaman bahwa *internal state* petani akan terepresentasikan dalam hasil kerja pertanian yang dilakukannya (Blair, 1997). Intensi mental petani yang positif memberi kesempatan pada kreasi budidaya pertanian yang optimal dan produktif, dan sebaliknya.

Menyimak kenyataan hidup petani yang rata-rata penuh tekanan hidup seperti telah disebutkan penulis sebelumnya, maka dapat dijajaki

tentang *internal state* yang berkembang dalam mental petani. Awalnya adalah kesulitan hidup yang objektif; persoalan ekonomi (kemiskinan), selanjutnya berkembang menjadi persoalan sosial dan psikologis. Pengalaman hidup yang susah (*deficiency*) telah merampas banyak energi petani untuk bertahan hidup. Secara akut, situasi ini melemahkan konsen sosial petani; petani terdorong untuk menjadi lebih memikirkan dirinya, dan mulai abai terhadap pentingnya dinamika sosial di sekitarnya. Fakta yang terjadi, petani mulai menjadi egois dan kurang memiliki keterlibatan sosial dalam kelompoknya, padahal awalnya profesi petani merupakan profesi yang secara natural bersifat kolektif. Seiring dengan merebaknya budaya kompetisi, petani lebih terkondisi untuk memikirkan kepentingannya saja (Widiyanto, 2007). Hal ini bisa ditemukan pada kasus pengairan sawah saat musim kering tiba, tak sedikit kasus perselisihan antar petani karena perebutan sumber air.

Perlahan tapi pasti, norma sosial berubah menjadi model-model relasi transaksional; yang mengedepankan nilai ekonomi daripada kebersamaan. Solidaritas antar petani mulai rapuh; gotong royong mulai menghilang dari kebiasaan sosial petani. Tidak ada lagi yang gratis bagi sumbangan tenaga yang diterima dari petani lain. Tidak ada barter tenaga, yang terjadi adalah transaksi jasa pertanian di sawah. Tentu saja hal ini semakin menambah beban biaya produksi pertanian.

Ketika berhadapan dengan lingkungan sosial yang lebih luas, saat petani bergaul keluar dan melihat profesi yang lain, disadarilah oleh petani bahwa kondisi yang dialaminya sangat berbeda; lebih miskin, lebih tidak pasti dibandingkan kelas profesi yang lain. Perasaan inferior mulai tumbuh. Menurut survei yang dilakukan penulis, banyak petani yang mengungkapkan perasaan rendah dirinya saat membandingkan dengan profesi yang lain. Menurut petani profesinya berada lebih bawah, tak hanya secara ekonomi karena miskin pun juga secara sosial karena dianggap lebih 'kasar dan kotor' (Widiyanto, 2007).

Pengalaman ekonomi dan sosial petani yang suram membangkitkan perasaan frustrasi yang kuat dalam keseharian petani. Kekecewaan-kekecewan yang tak terselesaikan membuahkan apatisme pada sebagian besar petani. Kepertanian yang dijalannya lalu dianggap sebagai sebuah ritual tanpa pilihan. Rasa malu dan tanpa kebanggaan

petani muncul sebagai identitas yang kuat di kalangan petani. Sekedar gambaran sederhana, berdasarkan survey yang dilakukan penulis pada isian pekerjaan KTP (kartu tanda penduduk), hanya 27 dari 100 petani yang mengisi pekerjaan dengan PETANI, selebihnya mengisi dengan isian SWASTA. Contoh sederhana ini menggambarkan bagaimana identitas sebagai petani tidak membanggakan mereka.

Hal tersebut memicu terjadinya depopulasi dalam komunitas petani; kebanyakan petani memilih untuk beralih pekerjaan jika ada kesempatan (pun kemungkinannya kecil, karena tingkat pendidikan mereka yang rata-rata rendah). Umumnya mereka banyak yang beralih ke kota sebagai buruh rendahan (Faturachman dan Walgito, 2002). Mereka pun tak pernah mengharapkan anak mereka untuk meneruskan profesi pertaniannya. Hampir tak ada lagi ungkapan cita-cita dari anak-anak desa yang ingin menjadi petani, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi pegawai atau lainnya. Intinya pekerjaan yang bukan petani.

Tekanan ekonomi yang berat membuat petani menjadi terlalu sibuk bertahan hidup dan abai pada pentingnya modal sosial. Hal yang semakin memperberat proses bertaninya karena ia tak lagi bisa mengharapkan bantuan sukarela dari rekan petani yang lain. Sementara perasaan inferior dan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri saat berhadapan dengan profesi lain. Dipicu oleh segala tekanan hidup dan perasaan yang marginal maka petani mulai kehilangan rasa bangganya saat menjalani profesi pertanian. Sebagai petani mereka mendapatkan pengalaman kegagalan yang kuat yang memicu penurunan hasrat bertani.

Melihat pengalaman petani yang *aversif*, bagaimana mungkin mereka bisa diharapkan untuk berkreasi dengan optimal; melakukan yang terbaik?. Bagaimana sebuah kegamaan mungkin menghasilkan sesuatu yang berkualitas?, jika hasil terbaik hanya bisa diciptakan dengan sikap mental yang baik tentang apa yang dilakukan, maka menjadi sepantasnya bila adagium ini dikontekstualisasi pada dunia petani.

Mengharapkan produksi pertanian yang berkualitas harus dimulai dari pembangkitan sikap positif pada petaninya. Mereka rasa bangga sebagai petani akan menciptakan motivasi yang kuat pada diri untuk melakukan yang terbaik; bertani sebaik-baiknya hingga menghasilkan panen yang terbaik. Hanya petani dengan sikap mental positif; yakin



Petani secara natural beraktivitas secara kolektif karena sifat budidaya pertanian dan prasyaratnya, maka dalam konteks ini efikasi kolektif kiranya menjadi konsep yang lebih representatif untuk mendudukan konteks dunia pertanian (Scott, 1985). Efikasi yang dimiliki individu akan dibagikan kepada individu lain dalam sebuah kelompok saat menghadapi tantangan tugas atau tujuan bersama, hingga terbentuk sebuah keyakinan bersama dalam kelompok tersebut. Inilah yang disebut dengan efikasi kolektif (*collective efficacy*).

Secara lebih definitif Bandura (1997) menjelaskan bahwa efikasi kolektif merupakan sebuah drajat yang menunjukkan tingkat kemampuan anggota kelompok dapat bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan tugas terkait dengan tujuan kelompok yang ada. Efikasi kolektif merupakan tingkat kepercayaan anggota kelompok tentang kinerja kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas yang berhubungan dengan tujuan-tujuan bersama. Ditambahkan oleh Bandura (1995) bahwa efikasi kolektif bukan sekedar kulminasi dari efikasi anggota yang ada di dalamnya namun lebih merupakan sebuah keyakinan kelompok sebagai sebuah sistem sosial menyeluruh. Menurut penjelasan Bandura, efikasi kolektif sangat ditentukan oleh kompetensi dan pengetahuan yang ada dalam suatu kelompok dan terfasilitasi dalam struktur sosial yang ada (Bandura, 1997).

Efikasi kolektif yang positif akan memberikan sebuah dorongan bagi setiap anggota dalam kelompok untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi sukses pencapaian tujuan bersama karena keyakinannya yang kuat (Pescosolido, 2001). Komunitas petani yang memiliki efikasi kolektif yang positif akan memiliki dinamika yang aktif demi mencapai sukses pertanian melalui mediasi penguasaan permasalahan (*problem mastery*), berbagi pengalaman dengan petani lain (*vicarious experiences*), persuasi dan dukungan sosial (*verbal persuasion*). Melalui perkembangan efikasi kolektif dalam komunitas petani, maka pengetahuan yang belum dimiliki pun akan berusaha didapatkan, untuk dibagi bersama dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Efikasi kolektif yang berkembang ditengarai dengan tumbuhnya tanggung jawab bersama, kekompakan kelompok dan interaksi sosial yang saling mendukung. Karakter ini mencerminkan sebuah atmosfer sosial yang



kondusif dalam sebuah kelompok; membuat setiap orang merasa nyaman berada dalam kelompok (Pescosolido, 2001). Saat kesulitan terjadi, maka akan secara bersama dicari solusinya. Setiap kegagalan yang dialami satu anggota akan menjadi perhatian kelompok; akan dimotivasi, disemangati.

Melalui penguatan efikasi kolektif petani, maka segala persoalan dan permasalahan pertanian relatif mudah dihadapi oleh petani melalui dukungan kelompok sosialnya. Penyebaran energi yang konstruktif pada masing-masing anggotanya akan terfasilitasi dengan baik demi mencapai sukses pertanian. Yang inferior akan dipulihkan, yang terasing akan dipertautkan kembali. Tidak ada kompetisi yang menjatuhkan, tidak ada perasaan senang saat rekan yang lain susah, dan yang terpenting adalah tumbuhnya tanggungjawab bersama bagi yang sukses pertanian.

Saat mentalitas petani telah menjadi tangguh, maka berbagai stimulasi yang diberikan (modal, alat dan teknologi) akan ditanggapi secara responsif oleh petani, dan diolah menjadi kekuatan yang potensial (Wahono, 2001). Mereka akan menciptakan kebanggaan dan harga diri sebagai petani dengan demikian fokus petani pada pangan menjadi lebih kondusif. Situasi ini akan menempatkan petani pada peran yang terpercaya dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui optimalisasi hasil pertanian baik dan semakin baik, dan senantiasa kontekstual dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Gambaran ketangguhan mental petani seperti di atas memungkinkan terbentuknya sistem kinerja pertanian yang berkelanjutan dalam menopang ketersediaan pangan baik dari segi mutu maupun kuantitasnya. Pencapaian kondisi ini akan memudahkan setiap pengambil kebijakan pangan untuk melakukan langkah-langkah yang konstruktif terkait dengan pasar dan kebutuhan pangan secara luas, hingga ketahanan pangan dapat ditegakkan menjadi lestari.

## 2. 6. PENGUATAN EFIKASI KOLEKTIF PETANI

Orientasi pengembangan mental petani melalui penguatan efikasi kolektif tentu bukanlah sebuah proses yang singkat dan gampang. Kesungguhan dan kesabaran dalam berproses merupakan hal yang pasti dipersyaratkan bagi setiap pemerhati pertanian dalam mengimplementasikan orientasi tersebut dalam program tindakan yang nyata. Membangun



mentalitas barangkali tak semudah membunuh hama dengan pestisida (walaupun ini juga bukan hal yang gampang). Investasi waktu dan tenaga yang tak terbatas mungkin akan menjadi taruhannya. Pun demikian tetap penting untuk dilakukan bagi penciptaan iklim pertanian yang lebih baik dan sehat di Indonesia.

Menggarap mental petani lebih sebagai sebuah seni daripada sebuah prosedur teknis. Bukan sebuah proses yang bertahap secara kaku, namun bisa secara simultan dilakukan bersama dengan aktivitas pendampingan yang lain. Inti tujuannya adalah melakukan transformasi mental petani untuk menjadi semakin kontekstual, bukan sekedar menambahkan pengetahuan kepada petani. Barangkali akan berlangsung lama (*time consume*) namun bukan berarti tidak bisa ditargetkan.

Belajar dari banyak sharing pengalaman tentang pengelolaan dan pemberdayaan petani di banyak wilayah, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan transformasi mental ini (Freire, 1974). **Pertama** adalah prinsip *contextual present*, yaitu sebuah prinsip yang menghendaki pendampingan petani dilakukan yang intensif. Jadi pendamping harus hadir dihadapan komunitas, memberikan model positif dan langsung kepada mereka, melalui bahasa mereka. Efikasi kolektif bukan substansi yang sederhana, sehingga membutuhkan intensitas dalam mensosialisasikannya melalui proses-proses modeling yang ideal. Mengambil kasus dari keseharian mereka akan lebih membantu pemahaman para petani tentang efikasi kolektif.

Prinsip yang **kedua** adalah *collaborative approach*, yaitu sebuah karakter pendekatan kepada komunitas yang sedapat mungkin melibatkan seluruh anggotanya dalam setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh pendamping (Freire, 1974). Prinsip ini mengedepankan partisipasi aktif seluruh anggota dalam melakukan aktivitas penguatan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada komunitas untuk berproses dan berinisiatif, bukan untuk 'menjinakkan'nya. Jadi pendamping lebih berfungsi sebagai fasilitator daripada sebagai narasumber. Efikasi kolektif sangat sensitif terhadap konteks sosio-kultural karena membutuhkan dukungan sistem sosial, sehingga peran aktif setiap anggota komunitas akan sangat berarti bagi pembentukan sistem nilai yang kontekstual dalam komunitas.



Prinsip yang **ketiga** adalah *sustainable conduct*, yaitu sebuah prinsip pendampingan komunitas yang mendasarkan pada komitmen keberlanjutan (Penuel & Wertsch, 1995). Pendampingan bagi penguatan komunitas bukan bersifat *hit and run*, namun harus berkelanjutan. Mental bukan sesuatu yang *stagnant* namun sangat peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Efikasi kolektif juga bukan sekedar keahlian sosial, namun lebih sebagai *social sense* yang membutuhkan pemeliharaan yang berkelanjutan. Prinsip ini bukan berarti bahwa pendampingan tidak bisa ditargetkan dan diregulasi; tahap-tahap pencapaian tetap bisa ditentukan sesuai konteks yang ada, sehingga tetap bisa dilihat kemajuan yang dicapai melalui sistem evaluasi yang akurat. Prinsip ini juga bukan berarti menciptakan ketergantungan komunitas kepada pendamping, namun lebih menekankan bahwa pendampingan komunitas adalah sebuah proses sepanjang waktu; regenerasi pendampingan pada tingkat komunitas perlu dipikirkan agar tidak menciptakan ketergantungan yang hipokrit (Sugiman, 2006).

Beberapa prinsip di atas merupakan karakter yang mendasari aktivitas pendampingan penguatan efikasi kolektif pada komunitas petani. Dalam prakteknya aktivitas penguatan tidak harus secara eksklusif dinyatakan dalam agenda kegiatan formal, namun lebih sebagai porsi yang harus disediakan dalam pendampingan pertanian yang dilakukan. Metode pelaksanaan pendampingan petani bisa menggunakan pola kebiasaan yang sudah ada (misalnya melalui PPL, atau pendamping lapangan pertanian lain), hanya substansinya yang harus diperbaiki. Jika biasanya pendampingan sekedar menyampaikan instruksi teknis dan formal sifatnya, maka bagi kepentingan penguatan ini perlu disediakan porsi substansi yang jelas.

Persyaratan SDM pendamping petani juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut; bukan hanya paham tentang pengetahuan teknis pertanian, namun juga memahami cara kerja pendampingan sosial, budaya pertanian dan dinamika kelompok. Persyaratan keahlian ini mutlak diperlukan untuk menunjang kegiatan penguatan mental petani secara lebih intensif.

Jalur pendampingan yang nonformal juga harus dibuka untuk lebih memberi kesempatan para petani berproses dalam kesehariannya. *Vocal person* dari lingkungan lokal perlu ditemukan dan direkrut sebagai mitra





lokal untuk mendukung keberlanjutan pendampingan. Pemberdayaan jalur dan fasilitator nonformal jika terkoordinasi dengan baik akan lebih mempermudah proses pendampingan yang dilakukan.

## 2. 7. PENUTUP

Ketahanan pangan merupakan strategi bagi stabilitas pangan. Secara lebih substantif ketahanan pangan dapat dipahami sebagai sebuah regulasi untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan; mengingat pentingnya pangan bagi kehidupan. Mencapai ketahanan pangan tidak bisa mengandalkan peran-peran eksklusif semata, namun harus melibatkan berbagai dimensi secara lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, tidak juga ahli pertanian saja, namun juga para penggerak dan pemikir psikososial budaya untuk berkolaborasi secara aktif bagi penciptaan kondusivitas pangan.

Praktek dan regulasi pangan yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan-pendekatan ekonomi dan teknis pertanian perlu ditinjau kembali secara kritis, mengingat segala kelemahan yang ada; tata kelola pangan yang berpihak pada pasar, degradasi kehidupan petani dan akses pangan yang rendah. Berbagai kelemahan yang timbul ternyata secara akumulatif telah menciptakan berbagai fakta yang sumir dan ironis bagi penegakan ketahanan pangan itu sendiri.

Memperhatikan dan melibatkan dimensi mental petani sudah selayaknya untuk dilakukan demi pencapaian ketahanan pangan yang lestari. Mendorong dan memupuk semangat mental mereka untuk menjalani profesi pertanian secara sadar dan bertanggung jawab akan berimplikasi pada produktivitas pertanian yang sejati. Melalui penguatan efikasi kolektif petani maka keyakinan akan sukses pertanian di kalangan para petani dapat dibangkitkan, hingga mereka mampu untuk berkontribusi secara optimal bagi penegakan ketahanan pangan.

Studi dan pendampingan petani secara intensif diperlukan bagi usaha-usaha penguatan mentalitas petani. Tentu saja langkah ini bukan sebuah tindakan jalan pintas yang akan segera menampakkan hasil; kesabaran dan kreativitas dalam berproses menjadi prasarat vital bagi setiap pendamping pun, demikian saat petani sudah berdaya, berkekuatan



mental, berkeyakinan sukses, maka menjadi lebih mudah bagi mereka untuk bertani secara optimis dan siap untuk mendedikasikan produktivitasnya bagi ketahanan pangan.

Salam Perjuangan!

## Daftar Pustaka

- Abbas. A, Soelaeman.Y, Abdurachman, A. 2003. Keragaman dan dampak penerapan sistem usahan tani konservasi terhadap tingkat produktivitas lahan perbukitan Yogyakarta. *Jurnal Litbang pertanian*, 22 (2), 49-56.
- Bandura, A. 1995 *Exercise of personal and collective efficacy in changing societies* In A. Bandura (Ed.), *Self-efficacy in changing societies* (pp. 1-46).
- Bandura, A., 1997. *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Ben Highmore. 2008, *Alimentary Agents: Food, Cultural Theory and Multiculturalism* *Journal of Intercultural Studies*, 1469-9540, Volume 29, Issue 4, 381 – 398.
- Blair, Harry. 1997. *Success and Failure in Rural Development: A Comparison of Maharashtra, Bihar and Bangladesh*. [http://www.virginia.edu/soasia/sym sem/kisan/papers/mabib.html](http://www.virginia.edu/soasia/sym_sem/kisan/papers/mabib.html). Diunduh pada 2 Maret 2009.
- BPS. 2008. *Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Pekerjaan*. <http://www.deptan.go.id/bpsdm/bbppketindan/index.php/home/37program/67-sebaran?format=pdf>. Diunduh pada tanggal 28 mei 2009.
- BPS. 2010. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2008*. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=2](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=2). Diunduh pada 15 Mei 2010.



- BPS. 2010. NTP April 2010 Turun 0,05 Persen Dibanding Bulan Sebelumnya. <http://www.bps.go.id/index.php?news=764>. Diunduh pada 15 Mei 2010.
- BPS. 2010. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia, 1999, 2002-2009. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=05&notab=7](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=05&notab=7). Diunduh pada 15 Mei 2010.
- BPS. 2010. Jumlah Rumah Tangga pertanian menurut Sensus Pertanian 1973, 1983 dan 2003. <http://www.google.co.id/#hl=id&q=Sensus+pertanian+2003%2BRumah+tangga+petani&aq=f&aqi=&aql=f&oq=Sensus+pertanian+2003%2BRumah+tangga+petani&gsrfai=&fp=1043b899e4ec1aa3>. Diunduh pada 5 Maret 2009.
- Budiastra I.Y. 2009. Meningkatkan Ketahanan Pangan di Perdesaan. <http://www.ristek.go.id/index.php?module=News%20News&id=4150>. Diunduh pada 16 Mei 2010.
- Fakih, M. 2003. *Bebas dari neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Faturochman dan Walgito, Bimo. 2002. Ketidakberdayaan dan Ketidakadilan pada Petani. *Jurnal Populasi* 3(1), 48-57.
- Freire, Paulo. 1974. *Education for Critical Consciousness*, London: Continuum.
- Gruber, Trevalyn. 2006. Bottom-up" Agricultural Reform: The Role of Collective Action in Validating Food Sovereignty. *Rural Sociological Society*. [http://www.allacademic.com/meta/p124954\\_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p124954_index.html). Diunduh pada 3 April 2009.
- Ilham dan Sinaga, B. 2009. Penggunaan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator komposit ketahanan pangan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%288%29%20soca-nyka%20ilahm%20sinaga-pangsa%20pengeluaran%281%29.pdf>. Diunduh pada 15 Mei 2009.
- Iwantoro. 2010. Revolusi Revolusi Hijau II" Alternatif Pembangunan Pertanian Ke Depan. <http://www.desamodern.com/?r=site/content/detail/12/417>. Diunduh pada 18 Mei 2010.
- Kualitas Beras RASKIN. Kompas 30 Januari 2010.
- Memantau Gaung Gerakan "Go Organik 2010". Berita pertanian On line. <http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=712&awal=0&page=&kunci=>. Diunduh tanggal 14 mei 2010.
- Penuel, W., & Wertsch, J, (1995). Vygotsky and identity formation: A sociocultural approach. *Educational Psychologist*, 30:83-92.
- Pescosolido, A.T. 2001. *Informal leaders and the development of group efficacy*.
- Saragih, Hendry. 2009. Janji untuk petani tak kunjung datang. Institute For Global Justice. [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=47&Itemid=155](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=155) diunduh pada 15 Mei 2010.
- Sarget. J. 1973. *Motivation and Meaning: Frankl logotherapy in the work*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scott. C. J. 1985. *The moral economy of the peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Shiva, Vandana. 2008. *Food safety, food security and agriculture*. India: Research Foundation for Science, Technology and Ecology.
- Sugiman, T. 2006. Theory in the context of collaborative inquiry. *Psichol Theory* 16:311-325.
- Wahono, F. 2001. Depolitisasi pangan: Sebuah upaya mengangkat kearifan lokal dan mendayagunakan keanekaragaman hayati. Dalam F. Wahono, A. B. Widyanto., & T. O. Kusumajati (ed), *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Widiyanto, C. 2007. *Pengalaman alienasi dan deprivasi Relatif Pada Petani*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.



### Tentang Penulis

**Cahya Widiyanto, S.Psi., M.Si.** adalah Mahasiswa S.3 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**Prof. Dr. Faturochman, M.A.** adalah Staf Pengajar dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.